

Implementasi Akuntansi Sektor Publik melalui Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Biro Pemotda Provinsi Kalimantan Tengah

¹⁾Desty Araini, ²⁾Jhon Lis Berger, ³⁾Theresia Mentari, ⁴⁾Sifera Patricia Maithy

^{1,3,4}Akuntansi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

² Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Indonesia

Email Corresponding: arainidesty8@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Akuntansi Sektor Publik
LAKIP
SAKIP
Akuntabilitas Kinerja
MBKM

Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan akuntansi sektor publik melalui pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka program MBKM. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya kualitas penyusunan LAKIP, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum konsistennya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dengan pendekatan kolaboratif, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen bersama aparatur. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan pengenalan, pengumpulan data kinerja, penataan dokumen, penyusunan LAKIP, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dokumen LAKIP Tahun 2025 berhasil disusun secara sistematis dan sesuai ketentuan, dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,35%. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman aparatur dalam penyusunan laporan kinerja. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjadi model implementasi MBKM yang aplikatif di lingkungan pemerintahan.

ABSTRACT

Keywords:
Public Sector Accounting
LAKIP
SAKIP
Performance Accountability
MBKM

This activity aims to implement public sector accounting through assistance in preparing the Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah at the Bureau of Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of Central Kalimantan Province within the MBKM program framework. The identified problems include suboptimal quality of LAKIP preparation, limited human resource capacity, and inconsistent implementation of Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. The method used is active participation with a collaborative approach, where students are directly involved as technical partners in the document preparation process. The activity was carried out through stages of introduction, data collection, document organization, LAKIP preparation, and evaluation. The results show that the 2025 LAKIP document was successfully prepared systematically in accordance with applicable regulations, with 100% physical achievement and 93.35% budget realization. In addition, there was an increase in staff understanding in preparing performance reports. This activity contributes to improving government performance accountability and serves as an applicable MBKM implementation model in the public sector.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya prinsip good governance. Akuntabilitas kinerja menjadi elemen utama

dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pencapaian program kepada publik. Akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (Yusuf Maolani et al., 2023). Selain itu, studi terbaru juga menegaskan bahwa sistem akuntabilitas berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah (Hendrik Latief et al., 2023).

Akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting dalam mendukung proses akuntabilitas tersebut. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja dan pengendalian anggaran berbasis hasil. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Hendrianto et al., 2022). Selain itu, LAKIP sebagai output utama menjadi representasi nyata dari pelaksanaan sistem tersebut. LAKIP merupakan hasil dari implementasi SAKIP yang menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah secara terukur (Firmansyah & Destiyana, 2022)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Implementasi SAKIP bertujuan menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas, terukur, dan konsisten dengan dokumen perencanaan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan SAKIP yang optimal mampu meningkatkan kualitas laporan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran (Pratiwi, S.T & Padriyansyah, 2025) menyatakan bahwa implementasi SAKIP di pemerintah daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi. (Syafirman & Syamsir, 2024) juga menegaskan bahwa implementasi SAKIP berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan integrasi dokumen perencanaan, evaluasi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi pegawai dalam penyusunan laporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih memerlukan penguatan, terutama dari sisi sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unit kerja yang mengemban fungsi strategis dalam koordinasi kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah di tingkat provinsi. Dengan dukungan 48 aparatur ASN dan pagu anggaran sebesar Rp4,02 miliar pada tahun 2025 dengan realisasi keuangan 93,35% dan capaian fisik 100%, biro ini terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan kerjanya. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas SDM dan kualitas penyusunan laporan kinerja yang memerlukan penyempurnaan.

Penerapan prinsip akuntansi sektor publik masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman aparat tentang akuntansi berbasis akrual dan keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan magang mandiri berdampak yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam penguatan kapasitas instansi pemerintah.

Melalui program Magang Mandiri Berdampak, mahasiswa berkesempatan terlibat langsung dalam proses pelatihan dan pendampingan penyusunan LAKIP di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan mengimplementasikan konsep akuntansi sektor publik secara praktis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. MASALAH

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah di tingkat provinsi. Biro ini didukung oleh aparatur yang menjalankan fungsi administrasi, koordinasi, dan fasilitasi program pemerintahan.



Gambar 1. Kondisi lingkungan kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum sepenuhnya optimal. Dokumen yang dihasilkan masih cenderung bersifat administratif dan belum menggambarkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan juga belum sepenuhnya spesifik dan terukur sehingga menyulitkan dalam proses evaluasi.

Selain itu, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum berjalan secara konsisten. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja, yang menunjukkan bahwa integrasi antar dokumen belum optimal. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan laporan sebagai alat pengambilan keputusan.

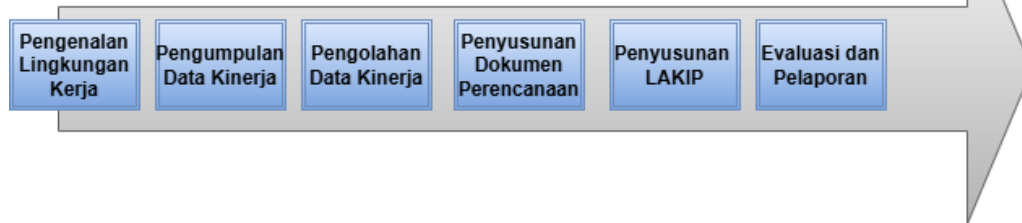
Permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Pemahaman aparatur dalam penyusunan indikator kinerja, pengukuran capaian, serta penyusunan LAKIP masih perlu ditingkatkan. Proses evaluasi kinerja juga belum dilakukan secara mendalam dan pemanfaatan data kinerja belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan dalam penyusunan LAKIP agar kualitas laporan kinerja dapat ditingkatkan. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan penyusunan laporan yang lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

III. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui program Magang Mandiri Berdampak. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi akuntansi sektor publik. Sasaran kegiatan adalah aparatur yang terlibat dalam pengelolaan data kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi.

Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dengan pendekatan kolaboratif. Mahasiswa berperan sebagai mitra teknis yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen bersama aparatur biro. Pendekatan ini bertujuan agar kegiatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktik dalam penyusunan laporan kinerja.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pendampingan Penyusunan LAKIP

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pengenalan lingkungan kerja
Tahap ini dilakukan untuk memahami kondisi awal instansi, meliputi struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem administrasi yang berlaku. Pemahaman ini menjadi dasar sebelum terlibat dalam kegiatan teknis penyusunan laporan kinerja.
2. Pengumpulan data kinerja
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan kinerja instansi, meliputi target kegiatan, realisasi program, serta data pendukung lainnya. Data diperoleh dari masing-masing bidang melalui laporan kegiatan dan dokumen terkait.
3. Pengolahan data kinerja
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui proses rekapitulasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengolahan data mencakup penyusunan capaian kinerja serta realisasi anggaran.
4. Penyusunan dokumen perencanaan
Tahap ini meliputi penataan dan pengorganisasian dokumen perencanaan seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan. Dokumen disusun secara sistematis agar sesuai dengan struktur penyusunan LAKIP dan mendukung keterpaduan perencanaan dan pelaporan.
5. Penyusunan dokumen LAKIP
Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumen LAKIP secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini mencakup penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran capaian, serta penyajian narasi kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi.
6. Evaluasi dan pelaporan
Tahap akhir dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah disusun untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, dilakukan pelaporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Data kegiatan diperoleh dari logbook harian, laporan mingguan, dokumentasi, serta diskusi dengan pembimbing lapangan.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan saling berkaitan dalam mendukung penyusunan laporan kinerja yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian melalui program Magang Mandiri Berdampak di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja yang sistematis dan terukur.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan sistem administrasi, pengumpulan data kinerja, hingga penyusunan dokumen LAKIP. Mahasiswa terlibat langsung dalam proses rekapitulasi data capaian kinerja dan realisasi anggaran dari masing-masing bidang.



Gambar 3. Proses pendampingan penyusunan LAKIP

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan dalam sistematika penyusunan laporan, terutama pada keterpaduan antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Penyajian data menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam proses evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan.

Capaian Kinerja

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan tiga sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum, peningkatan fasilitasi otonomi daerah, dan peningkatan fasilitasi kerja sama daerah. Berdasarkan dokumen LAKIP, seluruh sasaran strategis tersebut berhasil dicapai dengan capaian fisik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

| Kategori Capaian | Jumlah Indikator |
|------------------|------------------|
| Melebihi Target | 7 Indikator |
| Mencapai Target | 24 Indikator |

Indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tersusunnya dokumen LAKIP sesuai sistematika, meningkatnya pemahaman aparatur dalam penyusunan indikator kinerja, serta adanya keterpaduan antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja.

Dari sisi keunggulan, kegiatan ini memberikan pengalaman praktik langsung bagi mahasiswa dan membantu aparatur dalam penyusunan laporan kinerja secara lebih efektif. Dokumen yang dihasilkan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

Realisasi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp4,02 miliar, realisasi keuangan mencapai Rp3,75 miliar atau 93,35%. Realisasi ini terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 92,00% dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 94,00%. Perbedaan antara capaian fisik yang mencapai 100% dan realisasi keuangan menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi pencapaian kinerja.

Efisiensi ini mencerminkan kemampuan instansi dalam mengelola sumber daya secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Ampuhan (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran merupakan indikator penting dalam keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah daerah.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|----------------|---------------|----------------|------------|
| Total Anggaran | 4.020.559.822 | 3.753.337.603 | 93,35% |

Implementasi Akuntansi Sektor Publik

Penyusunan LAKIP di biro ini mencerminkan penerapan prinsip akuntansi sektor publik, terutama transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja berbasis hasil. Dokumen disusun dengan mengacu pada perencanaan strategis seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja, serta menyajikan perbandingan antara target dan realisasi sebagai dasar evaluasi kinerja.

Keterpaduan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi sektor publik telah diterapkan secara nyata. Hal ini terlihat dari adanya hubungan yang jelas antara program yang direncanakan dengan hasil yang dicapai serta penggunaan anggaran yang dilaporkan secara terbuka.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Ampuhan.A, 2025), integrasi antara dokumen perencanaan seperti Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja dengan laporan kinerja merupakan faktor penting dalam menjamin konsistensi pelaporan. Dalam kegiatan ini, keterlibatan mahasiswa membantu meningkatkan kualitas penyusunan laporan melalui pengolahan data, penyesuaian indikator, serta penyusunan narasi kinerja yang lebih sistematis.

Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak pada peningkatan pemahaman aparatur terhadap penyusunan laporan berbasis kinerja. Aparatur menjadi lebih memahami pentingnya indikator yang terukur, keterkaitan antara target dan realisasi, serta penyajian data yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.



Gambar 4. Halaman Sampul Dokumen LAKIP Tahun 2025

Analisis Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan beberapa keunggulan, yaitu meningkatnya kualitas dokumen LAKIP, keterpaduan data kinerja, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pendekatan pendampingan yang dilakukan juga mampu meningkatkan pemahaman aparatur secara langsung melalui praktik.

Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan perbedaan tingkat pemahaman aparatur dalam penyusunan laporan kinerja. Selain itu, proses pengumpulan data dari berbagai bidang memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Ke depan, kegiatan ini memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan sistem informasi kinerja berbasis digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk mendukung penyusunan laporan kinerja yang lebih akurat dan tepat waktu.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu dan masih adanya perbedaan pemahaman aparatur terhadap konsep akuntansi sektor publik. Tingkat kesulitan kegiatan terutama terletak pada proses pengumpulan dan sinkronisasi data dari berbagai bidang.

Kegiatan ini memiliki peluang pengembangan ke depan, terutama dalam peningkatan kualitas analisis kinerja dan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung penyusunan LAKIP.

V. KESIMPULAN

Kegiatan MBKM melalui pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini menghasilkan dokumen LAKIP Tahun 2025 yang tersusun secara sistematis dan mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan capaian kinerja yang baik ditunjukkan oleh realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,35%.

Selain itu, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan laporan kinerja, terutama dalam penentuan indikator dan pengukuran capaian kinerja. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif memberikan pengalaman praktik bagi mahasiswa sekaligus membantu aparatur dalam memperbaiki kualitas penyusunan laporan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam waktu pelaksanaan dan perbedaan tingkat pemahaman aparatur, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan agar kualitas akuntabilitas kinerja instansi dapat terus ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan MBKM ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada pihak perguruan tinggi yang telah memfasilitasi program MBKM sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allisa, S., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran Akuntabilitas Pada Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal EMA – Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntans*, 8.
- Ampuhan, A., & Pasuruan, P. K. (2025). Implementasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel. *DEMOKRASI*, 6(2).
- Ariella Belinda, P., & Costari, N. (2021). PENTINGNYA IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAHAN. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* (Vol. 1, Number 1).
- Firmansyah, I., & Destiyana, M. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERIODE 2015-2020 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILLIR (STUDI KASUS PADA BPKAD OGAN KOMERING ILLIR). *LAND Journal*, 3, 99–110.
- Hendrianto, Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). IMPLEMENTASI PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH. *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 19(2).

- Hendriarto, P., Hakim Sangapan, L., Budi Paryanti, A., Haymans Manurung, A., & Manurung, A. (2025). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3. <https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2>
- Hendrik Latief, Syachrumsyah Asri, & Agus Santosa. (2023). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Khaeruddin, F., & Aditiya, R. (2020). EVALUASI-IMPLEMENTASI-SISTEM-PENGUKURAN-KINERJA-INSTANSI-PEMERINTAH-DAERAH. *ASSETS*, 10, 195–209.
- Pratiwi. S.T, & Padriyansyah. (2025). DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN PADA IMPLEMENTASI SAKIP: STUDI KASUS BERBASIS DOKUMEN LKJIP PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3, 1164–1172.
- Setiyana, D., Zahro, N. A., Hananya, A., Dewi, P. K., Matondang, K. A., & Ekonomi, I. (2026). *Implementasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: Systematic Literature Review 2020-2025*.
- Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106–113. <https://doi.org/10.58784/rapi.67>
- Susang, E. G., Joyce, S., & Rafael, M. (2019). *ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG* (Vol. 7, Number 1).
- Syafirman, S., & Syamsir, S. (2024). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 3(3), 227–231. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.223>
- Usman, A., Abdullah, J., Saprudin, S., Masjhur, M. A. R., & Bilondata, N. (2026). Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Transparansi Laporan Keuangan, dan Kepatuhan Regulasi dalam Mendorong Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 5(1), 145–159. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v5i1.810>
- Yusuf Maolani, D., Siti Nuraeni, A., Dellyani, A., Fikry Al Huda, E., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 21, Number 2). <http://jurnaldialektika.com/>